INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027
beserta Nota Keuangannya

Di Depan Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia








PIDATO PRESIDEN
REPUBILK INDONESIA

Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya

Di Depan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

81 INDONESIA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR

JAKARTA, 14 AGUSTUS 2026
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan, *Rahayu-Rahayu.*

Yang saya hormati, Wakil Presiden RI Saudara Gibran Rakabuming.

Para Pimpinan Lembaga Negara: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Saudara Ahmad Muzani, beserta Para Wakil Ketua dan Anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI, Saudara Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuliati Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Seluruh Anggota DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Saudara Sultan

Bachtiar Najamudin, beserta Para Wakil Ketua, dan Anggota DPD RI.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Chair Ramadhan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Saudari Isma Yatun.

Para Menteri Koordinator, Para Menteri, Kepala Badan, Para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Para Wakil Menteri serta seluruh Anggota Kabinet Merah Putih.

Yang terhormat, Para Pimpinan Partai Politik:

Partai PDI Perjuangan, diwakili oleh Saudari Puan Maharani Ketum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia Partai Gerindra, hadir Ketua Harian, Prof. Sufmi Dasco Ahmad Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Saudara Zulkifli Hasan Ketum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Saudara Abdul Muhaimin Iskandar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saudara Al Muzzammil Yusuf Ketum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Dharma Paloh.

Yang saya hormati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan,

Saudara Sebangsaku dan Setanah Air, Seluruh Rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada.

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nyalah kita berdoa dan hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan.

Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat pengabdian, dan cinta tanah air.



Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pertama saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita.

APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan pupuk, membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya.



Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam

bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit.

Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, Bendera Merah Putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di Puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan: setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita.



Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi

di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun, di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak.



Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh kuat 18,2 persen. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi.

Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan

kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya.

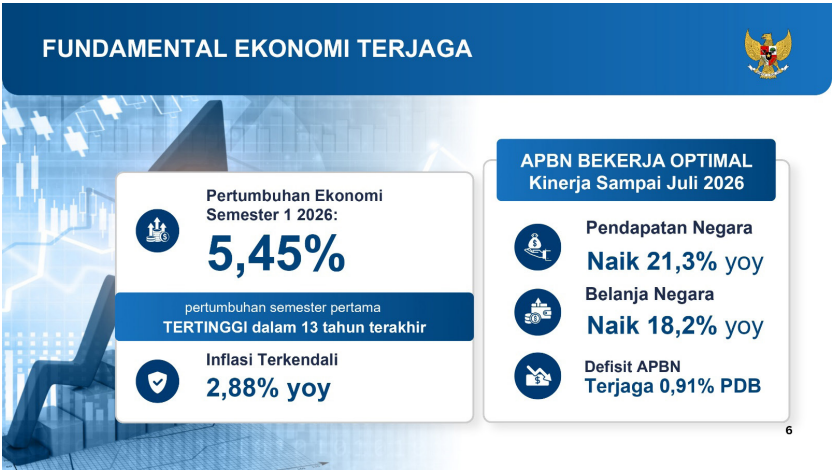

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 13 Juli 2026, salah satu *rating agency* internasional yang kesohor, *Standard & Poor's* (S&P), mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB (*triple B*) dengan *outlook* stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia dan Indonesia tetap berada pada kategori *investment grade*. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif *prudent* dan *sustainable* dibandingkan negara-negara

setara. Ini bukan kata pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita.

Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memberantas praktik-praktik *under-invoicing* dan *transfer pricing* yang sesungguhnya adalah praktik penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari Barat.

Dari Timur, lembaga *rating* Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Credit Rating, justru memberi *rating* AAA/*Stable* yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali.





Sidang yang terhormat,

Kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan,

Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong "Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat". Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid; transformasi ekonomi pada

aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat; program-program unggulan harus berjalan efektif; program perlindungan sosial harus andal; pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan; dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat; harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu.



RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola

pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.



Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun Rupiah, naik dari 3.842,7 triliun Rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426,0 triliun Rupiah, naik dari 3.153,6 triliun Rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun Rupiah dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto.



Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 Rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. *Lifting* minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari dan *lifting* gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026, 6,5 sampai 7,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026. Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten.

Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan.

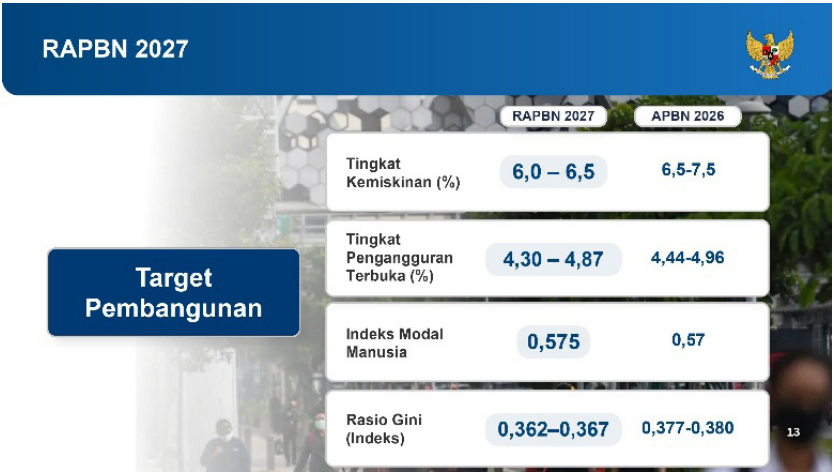

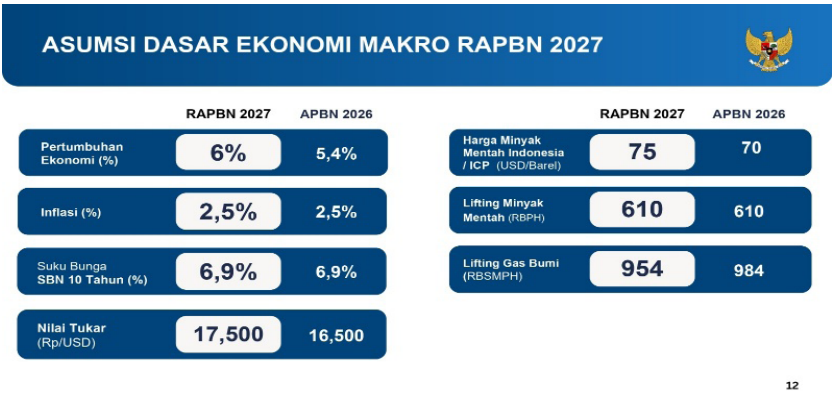

Saudara-saudara sekalian,

Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat tergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan *rebasing* atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa-desa kita, perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar Saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat, dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar Saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya.



Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun Rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun Rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Tapi, jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting.

Saudara-saudara sekalian,

Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.



Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah Pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan 1.200 triliun Rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun Rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar Amerika Serikat, ini bukan angka yang

kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun Rupiah, dan ini adalah di tangan kita.

Sebagai contoh tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP, yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta Rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta Rupiah per unit. Ini penghematan hampir enam kali. Enam kali penghematan. Ini riil. 150 juta Rupiah kita beli dengan harga 26 juta Rupiah termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal.

Saudara-saudara sekalian,

Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati.

Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara

digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas, sekolah, yang bisa kita perbaiki, Puskesmas yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan, dan ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Hari ini saya akan gunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia.

Pertama, kita akan memperbaiki seluruh Puskesmas di Indonesia.

Ternyata Puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu

memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat.

Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar Rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030.

Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu, kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit.



Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam, sampai 9 jam, pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah, harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana.

Saudara-saudara sekalian,

Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah.

Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah

awal kita, kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini, saya melaporkan, dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT *Scan*, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita juga di setiap gerai Koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh.



Saudara-saudara,

Tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat, terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi: kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi.

Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten/kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu, kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Ini kita akan upayakan lebih banyak lagi.

Saudara-saudara sekalian,

Bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu empat presiden sesudah saya.

Saudara-saudara sekalian,

Rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif.

Rumah Sakit Baru Telah Selesai



19

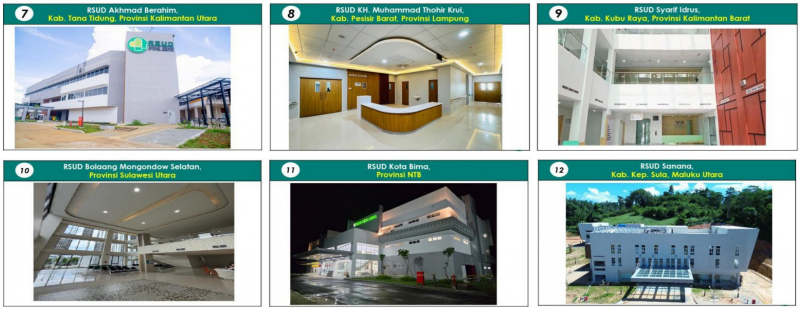

20

Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029.

Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat.

Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka, tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.

Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita.



Saudara-saudara sekalian,

Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh, tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak.

Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan tiga layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima satu, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya empat ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan *long distance learning*, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota-ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan.

Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tetapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis.

Kalimantan Selatan SD NEGERI 005 KRAYAN TIMUR





Kalimantan Barat SMP NEGERI 1 ALUH-ALUH





23

Sumatra Utara TK GRACE PARONGIL





Sumatra Selatan SMA NEGERI 6 TEBO

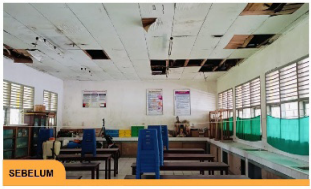



22

Maluku Utara SD NEGERI 81 KOTA TERNATE



24

Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita.

Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia, kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi, terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia, justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masak mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada Wakil-Wakil Rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?

Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita mengubah ini. Saya katakan di sini, saya yakin Saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak-cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri.



Tapi tentunya, kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga terlalu tinggi, itu juga enggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja

dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini.

Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR-RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara Pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi. Kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR-RI sekarang ini. Saya terima kasih. Terima kasih khusus, sekali lagi, untuk PDI-P. Sebenarnya ini bukan *Prabowonomics*, ini marhaen. PDI-P susah tidak mendukung ini.

Saudara-saudara,

Dengan ini kita akan membangun Indonesia *Reference Price*, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit.

Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan lanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan, soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya.

Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat, negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan.



Kelima, kita akan percepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara.

BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat, dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini, maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik.

Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi.

Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan, akan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN, bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia.

Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut *National Monetisation Pipeline*. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, ada *airport* yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?



Saudara-saudara,

Sebagai contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Itu akan kita rintis.

Keenam, kita telah mulai dan akan bangun 100.000 megawatt, atau 100 gigawatt Energi Surya.

Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.

Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita.

Idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 gigawatt atau saya ulangi, 1 megawatt satu desa.



Saudara-saudara sekalian,

Menko Perekonomian telah menghitung, dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun Rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa.

Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII.

Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta, dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII.

Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim *ad hoc* dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan

dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, *bullion*, *fintech*, keuangan syariah, *family office*, *treasury center*, dan manajemen investasi.



PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, *golden visa*, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan.

Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai.

Kedelapan, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF.

Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek, dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN.

Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas sudah dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita luncurkan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja, dua perusahaan swasta besar telah bekerja, dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik.

Kita juga harus membangun *Giant Sea Wall*, tanggul besar untuk mengamankan Pantai Utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan, jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. *Giant Sea Wall* di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. *Giant Sea Wall* kita di Pantai Utara

Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut.

Selain itu, *Giant Sea Wall* kita di Pantai Utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk *Giant Sea Wall* ini. Proyek *Giant Sea Wall* ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan *Giant Sea Wall* ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden ke berapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad presiden kedelapan akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen, dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apa pun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi, masa depan industri kita juga dipertaruhkan.



Kesembilan, kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat.

Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh

perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya.

Saudara-saudara,

Kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik, hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus. Saya ulangi, setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki tiga kemenangan bagi bangsa kita.

Pertama, penghematan bagi rakyat, penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar 50 persen lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM, bahkan bisa nanti turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan sekarang, pengurangan impor energi, dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia.

9 MEMPERCEPAT ELEKTRIFIKASI MOBILITAS

Peluncuran ekosistem **motor listrik nasional.**

Insentif untuk satu juta motor listrik produksi dalam negeri.

Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi BBM impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional.





Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan (DPR), saran Pemerintah Indonesia. Saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha,

seniman, atlet, terutama pemain bola profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air.



Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara.



Saudara-saudara sekalian, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan,

Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote untuk memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat.

Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. *Indonesia International Financial Center* atau PFII akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi.

Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional.

Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia.

Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat.

Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama.

Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran, tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran, setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban.

Untuk itu, saya juga mengajak kita semua untuk terus menerus koreksi diri dan terus menerus meningkatkan disiplin.

Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman: ancaman kemiskinan, ancaman

bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain, ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan.

Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa. Kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, *mark up*, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga.

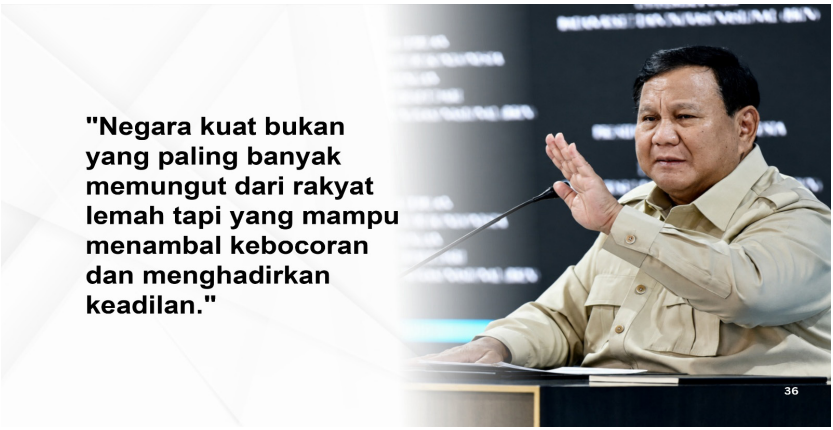

Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun

besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru, daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara Hari Kemerdekaan secara terpusat, itu wajib.



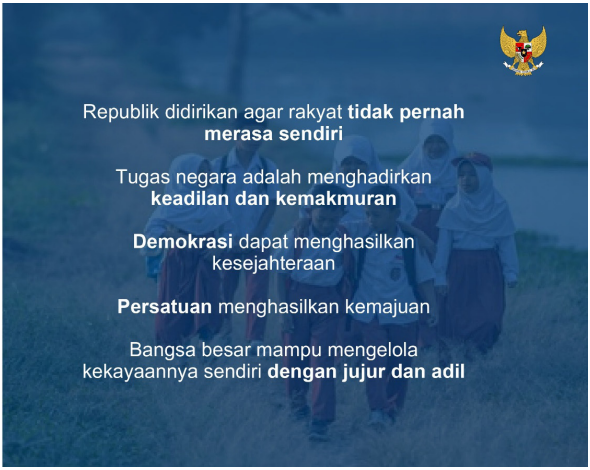

INDONESIA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, taufik, dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah, harapan seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka! Sekali berdaulat, terus berdaulat! Merdeka!

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan, *Rahayu-rahayu,*

Selesai.

Jakarta, 14 Agustus 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRABOWO SUBIANTO



INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR

Delapan puluh satu tahun kemerdekaan Indonesia
adalah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Hari ini, perjuangan itu berlanjut.

Memperkuat kedaulatan.
Memperluas keadilan.
Mewujudkan kemakmuran.

Karena Indonesia yang merdeka bukanlah tujuan akhir.

Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur
adalah cita-cita yang harus kita wujudkan bersama.